

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya informasi dan komunikasi tentunya sudah sangat lumrah yaitu sebagai media untuk orang lain mengetahui sesuatu yang baru tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan informasi dan komunikasi yang baik sangat di perlukan salah satunya yaitu di dalam proses pembiayaan pendidikan dimana seluruh elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan tersebut harus mengetahui pembiayaan pendidikan tersebut seperti di gunakan untuk apa atau di salurkan kemana biaya pendidikan itu, yaitu melalui penyaluran informasi dan komunikasi yang baik ke seluruh elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan tersebut, maka disini di perlukan pengelolaan informasi dan komunikasi dengan baik dan benar yaitu dengan memanajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan dengan transparan dan tanpa ada yang di tutup-tutupi, dimana semuanya di informasikan dan di komunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan yang bersangkutan.

Masyarakat atau orang tua peserta didik dalam mengetahui pembiayaan pendidikan di sekolah itu menjadi hal penting karena tidak dapat dipungkiri masyarakat atau orang tua peserta didik adalah elemen atau bagian yang mendapat dampak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam pembiayaan pendidikan apalagi dalam pembiayaan pendidikan masyarakat atau orang tua peserta didik

juga ikut andil atau ada pembiayaan pendidikan yang juga bersal dari masyarakat atau orang tua peserta didik oleh karena itu sebaiknya segala sesuatu dan juga pengambilan keputusan mengenai pembiayaan pendidikan diinformasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat atau orang tua peserta didik.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XIII pendanaan (pembiayaan) pendidikan bagian kesatu tanggung jawab pembiayaan pasal 46 yaitu: (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Sumber Pembiayaan Pendidikan Pasal 47 yaitu: (1) Sumber pembiayaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan mengenai sumber pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga manajemen pembiayaan Pendidikan pasal 48 yaitu: (1) Manajemen pembiayaan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (2) Ketentuan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat pengalokasian pembiayaan pendidikan pasal 49 yaitu: (1) pembiayaan pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (3) Pembiayaan pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pembiayaan pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai pengalokasian

pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹

Berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan pembiayaan dari berbagai instansi dapat dilihat dari sasaran penyaluran zakat. Seperti firman Allah SWT dalam (QS. At-Taubah ayat 60), yaitu:...

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { ٦٠ }

Bahwa yang dimaksud jalan Allah ialah kemaslahatan umum kaum Muslim yang karenanya haruslah urusan agama dan negara, bukan urusan individu... Menyumbangkan materi untuk kepentingan umum sebagaimana dikemukakan Michael Stanton adalah salah satu rukun Islam, yakni zakat, yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan pengembangan Islam. Pendidikan jelas termasuk pada kategori kedua. Mereka yang membantu pendidikan secara material sangat dihormati... Para ulama fikih mengatakan, bahwa istilah sedekah searti dengan zakat. Rahmat Taufiq Hidayat mengemukakan bahwa sedekah mengandung pengertian yang sangat luas, mencakup sedekah wajib dan sedekah sunah. Sedekah wajib adalah infak dan zakat." Ini berarti sedekah juga diberikan kepada *ashnaf* yang berhak menerimanya. Dan lembaga pendidikan termasuk dalam kategori ini, Dalam kaitan ini apabila dilihat dari kegunaan sedekah, maka sedekah dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam pendidikan lebih diarahkan pada pembiayaan lembaga pendidikan baik sarana maupun prasarana serta pemeliharaannya termasuk juga gaji guru...²

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa sah-sah saja mengeluarkan pembiayaan atau bersedekah ke dalam dunia pendidikan, tentu saja hal ini juga dapat menjadi acuan terutama bagi orang tua murid yang menyekolahkan anaknya bahwa mengeluarkan biaya pendidikan itu adalah hal yang baik dan dapat bernilai sedekah serta tentu saja sekolah lebih baik agar

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 20

² Abuddin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 284-286.

mengkomunikasikan dan menginformasikan tentang penggunaan pembiayaan pendidikan tersebut.

Alangkah baiknya jika melakukan pungutan adanya kejelasan dana itu digunakan untuk apa lalu diinformasikan dan dikomunikasikan kepada orang tua peserta didik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan berbagai prasangka tidak baik ke pihak sekolah dan dapat menimbulkan protes berlebihan dari masyarakat atau orang tua peserta didik. Karena jika semua dapat diinformasikan dan dikomunikasikan kepada orang tua peserta didik dengan baik dan mereka mengerti dan dapat memahaminya apa maksud dari sekolah mengadakan pungutan tentu tidak akan terjadi kesalahpahaman antara orang tua siswa dan pihak sekolah dalam garis besarnya pungutan tersebut memang digunakan untuk hal yang positif dan tidak menyimpang. Informasi adalah data yang sudah diolah ke dalam bentuk tertentu sesuai dengan keperluan pemakaian informasi tersebut. Kalau data umumnya berada pada tingkat transaksi, maka informasi umumnya berada pada tingkat manajemen.³

Komunikasi adalah suatu proses sosial. Ketika menginterpretasikan komunikasi secara sosial (social), maksud yang disampaikan adalah komunikasi selalu melibatkan manusia serta interaksi. Artinya, komunikasi selalu melibatkan dua orang, pengirim dan penerima. Keduanya memainkan peranan yang penting dalam proses komunikasi. Ketika komunikasi dipandang secara sosial, komunikasi selalu melibatkan dua orang yang berinteraksi dengan berbagai niat, motivasi, dan kemampuan. Kemudian, ketika membicarakan komunikasi sebagai proses (process), hal ini berarti komunikasi bersifat berkesinambungan dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga dinamis, kompleks, dan senantiasa berubah.⁴

Pada PP No. 48 Tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan pasal 2 ayat 1 menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi 3 hal yakni biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik. Pasal-pasal selanjutnya juga menjelaskan beberapa komponen biaya dari setiap turunan biaya pendidikan tersebut. Meski demikian, setiap turunan biaya pendidikan yang dimaksud (bahkan termasuk biaya investasi) dapat

³ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 300.

⁴ Richard West and Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, Penerjemah: Maria Natalia Damayanti Maer, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 6.

bersumber dari masyarakat. Hal ini memungkinkan peluang adanya tarikan atau pungutan dari penyelenggara pendidikan pada peserta didik.⁵

Pembiayaan pendidikan didapat dari Pemerintah baik pusat atau daerah, serta masyarakat." Seperti anggaran Pemerintah, bantuan Pemnerintah Daerah, pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan, bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan sumber lain yang sah.⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah dan juga dari orang tua peserta didik atau masyarakat artinya sekolah berhak melakukan pungutan dari masyarakat dan alangkah baiknya tindakan tersebut diinformasikan dan dikomunikasikan kepada orang tua peserta didik atau masyarakat untuk apa pungutan tersebut digunakan agar terjadi kejelasan dan tidak terjadi kesalahpahaman, dalam hal ini perlu adanya manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan yang baik dari pihak sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Informasi dan Komunikasi Pembiayaan Pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin" dengan judul ini saya ingin mengetahui bagaimana proses dan penerapan manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan. Sejarah singkat terbentuknya SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Untuk merealisasikan rencana

⁵ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 31.

⁶ Sujari Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah*, (Lampung: Gree Publishing, 2019), h. 5.

pengembangan pusat pendidikan Islam Sabilal Muhtadin diareal Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin oleh Pemda Kalsel, telah disediakan sebidang tanah yang terletak diareal Masjid Raya Sabilal Muhtadin seperti terlihat jelas dalam maket Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mendirikan bangunan. Selanjutnya untuk mewujudkan itu semua, didirikan pertama kali TK Islam tahun 1987 kemudian SD Islam tahun 1988 disusul SMP Islam tahun 1992 dan SMA Islam Sabilal Muhtadin tahun 1999.

Mengenai pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang saya ketahui yaitu, biaya pendaftaran Rp 250 ribu, infak gedung Rp 8 juta, biaya bulanan Rp 600 ribu dan pada waktu jam makan siang peserta didik tidak pulang untuk makan dirumah, tetapi mereka memakan makanan yang disediakan oleh kantin sekolah. Biaya sekolah yang dibayar tiap bulannya sudah ditambah dengan biaya uang makan untuk satu bulan.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan di SD Islam Sablila Muhtadin Banjarmasin. Dimana fokus penelitian tersebut dijabarkan dalam pernyataan dibawah ini.

1. Manajemen informasi dalam pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin ke semua elemen yang memerlukan informasi tersebut, salah satunya orang tua murid atau masyarakat.

2. Manajemen komunikasi dalam pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin ke orang tua murid atau masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen informasi pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui manajemen komunikasi pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

D. Signifikansi Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini, manfaat teoritis yang diperoleh yaitu:

1. Bagi Penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan.
2. Bagi pembaca atau peneliti lain, sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagaimana sistematika penulisan skripsi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagaimana proses dan penerapan manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan di sekolah.

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi ilmiah dalam manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan di sekolah.
2. Bagi kepala sekolah, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan ilmu pengetahuan bagaimana cara manajemen dengan baik.
3. Bagi pegawai di administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan ilmu pengetahuan bagaimana manajemen atau mengelola informasi dan komunikasi dari sekolah dalam menjalin hubungan dengan orang tua peserta didik atau masyarakat.
4. Bagi pegawai di administrasi keuangan, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan ilmu pengetahuan bagaimana mengelola keuangan sekolah atau pembiayaan pendidikan.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen Informasi Pembiayaan Pendidikan

Manajemen Informasi dalam hal ini adalah bagaimana mengelola serta memelihara informasi dengan baik dan benar agar informasi tetap utuh dan terjaga serta tersedia bagi siapa saja yang memerlukan informasi tersebut dan tersampaikan ke pihak yang ditujukan untuk menerima informasi yaitu informasi mengenai pembiayaan pendidikan.

2. Komunikasi Pembiayaan Pendidikan

Manajemen komunikasi adalah proses menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan teknis dalam memahami dan melakukan fungsi komunikasi di dalam suatu lembaga atau instansi. Manajemen komunikasi dalam hal ini ialah manajemen komunikasi dalam pembiayaan pendidikan yaitu mengelola komunikasi agar terjadi komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua murid mengenai pembiayaan pendidikan tersebut agar pembiayaan yang dimaksud oleh sekolah dapat dimengerti oleh orang tua murid.

3. SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin

SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin adalah sekolah dasar yang berciri khas Agama Islam di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sekolah ini didirikan pada tahun 1988 yang bertempat di Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Antasari Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.

Selanjutnya agar pembahsan dalam penelitian ini tidak meluas, maka bahsan dalam penelitian ini dibatasi:

1. Yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pegawai di adminstrasi hubungan sekolah dan masyarakat dan pegawai di administrasi keuangan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

2. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana manajemen informasi dan komunikasi pembiayaan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3. Penelitian dilaksanakan di SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam peninjauan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, diantaranya:

1. Penelitian dari Ahmad Saifudin, Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama Global Madani Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan SMP Global Madani meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan, kegiatan perencanaan keuangan yang berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana dan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh ketua yayasan, dalam meningkatkan kualitas SDM SMP Global Madani mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler. SMP Global Madani Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam keadilan, kejujuran, amanah, transparansi dan

akuntabilitas. Ini ditunjukkan adanya perbedaan antara golongan I dan II, guru sangat objektif kepada siswa, manajemen tidak pernah memberikan data yang fiktif dan laporan keuangan tersusun rapih.

2. Penelitian dari Nasta'in Ahmad, Skripsi dengan judul "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari Terseno Batang". Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam meningkatkan mutu MIS Tanjungsari meliputi kegiatan perencanaan keuangan madrasah yang berupa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dengan dana BOS dan pengembangannya, pelaksanaan pembiayaan pendidikan mencakup: penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban keuangan madrasah yang bertujuan untuk mengetahui semua program kerja madrasah apakah sudah berjalan sesuai target apa belum sehingga memungkinkan adanya perbaikan ke depannya. Pemeriksaannya dilakukan kepala sekolah sedangkan pertanggungjawaban keuangan madrasah kepada pihak madrasah, komite serta tim manajemen BOS tingkat kabupaten kota setempat. Sumber keuangan madrasah tidak hanya dari pemerintah saja tetapi dari wali murid, donatur, dan masyarakat.

3. Penelitian dari Windi Apriliyanti, Skripsi dengan judul "Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Kelas IX Di SMP Islam Raudatul Hikmah Pamulang". Berdasarkan hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa uji t menunjukkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$, yaitu $3,779 > 2,119$, yang artinya H_0 ditolak. Kemudian dari hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 38,833, yang artinya mutu lulusan SMP Islam Raudlatul Hikmah Pamulang adalah sebesar 39. Nilai koefisien regresi variable harga (b) bernilai positif yaitu 0,521 yang artinya jika manajemen pembiayaan meningkat sebesar 0,521, maka mutu lulusan pun meningkat sebesar 0,521. Serta nilai R^2 sebesar 0,472 yang artinya, sebesar 47,2% mutu lulusan SMP Islam Raudlatul Hikmah Pamulang dipengaruhi oleh manajemen pembiayaannya, dan sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Penelitian dari Vita Andini Yulicha, Skripsi dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Yayasan Bakong Pittaya School Pattani Thailand Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembiayaan di Bakong Pittaya School dilakukan mulai awal bulan April sampai dengan Juni. Dalam tiga bulan tersebut, Bakong Pittaya School akan melakukan rapat bersama dewan yayasan dan guru, kemudian akan di sahkan oleh yayasan yang nantinya akan diajukan kepada pihak Kerajaan Thailand. Setelah diterima, pihak kerajaan akan memberikan dana sesuai dengan laporan jumlah siswa. Proses pembelanjaan pembiayaan di Bakong Pittaya School berupa dana yang diperoleh dari kerajaan sebesar 1,4 juta THB untuk seluruh biaya operasional, sedangkan biaya untuk gaji guru dan karyawan sebesar 1,2 juta THB. Proses pengawasan dilakukan oleh departemen pendidikan setempat yang dilakukan pada awal dan akhir semester.

Sedangkan dilingkup sekolah adalah manajer utama sendiri yang dilakukan secara insidental. Proses pertanggungjawaban pembiayaan di Bakong Pittaya School berupa laporan terperinci dengan memuat bukti pengeluaran dan pemasukan berupa kwitansi yang akan disampaikan setiap bulan Maret . Hambatan Bakong Pittaya School dalam pembiayaan pendidikannya adalah ketika dana yang diberikan oleh pihak kerajaan tidak cukup untuk memenuhi segala kegiatan.

Adapun dari beberapa penelitian yang relevan tersebut, penelitian yang penulis buat memang sedikit berbeda karena penelitian yang dibuat oleh penulis lebih fokus ke manajemen informasi dan komunikasi tetapi masih mempunyai hubungan yaitu pada bagian manajemen pembiayaan pendidikan, maka penelitian terdahulu tersebut bisa dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian.